BANTUAN HUKUM

2024

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 7, LD 2024/ NO. 7, TLD NO. 74, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 8 Tahun 1965; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.42 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi pemberian bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata. Selanjutnya diatur tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi Masyarakat miskin dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan PUU; penyelenggara bantuan hukum dilakukan melalui pemberian fasilitasi anggaran Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pemberian bantuan hukum meliputi perkara perdata dan pidana yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi dan dikecualikan terhadap tindak pidana Narkotika; Pidana Korupsi dan terorisme. Selanjutnya dalam peraturan ini datur tentang Hak dan Kewajiban; Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pengajuan Rencana Anggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; larangan; sanksi administratif; ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2024
- Penjelasan 5 hlm